

Media Online	Jateng.tribunnews.com
Tanggal	30 Oktober 2023
Wilayah	Kabupaten Kudus



40 Persen DBHCHT di Kudus Digunakan untuk Bidang Kesehatan

<https://jateng.tribunnews.com/2023/10/30/40-persen-dbhcht-di-kudus-digunakan-untuk-bidang-kesehatan>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pj Bupati Kudus, Bergas Caturisasi Pananggungan mengatakan saat ini penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih berjalan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur di Kabupaten Kudus.

Penggarapan infrastruktur, dan fasilitas di Kabupaten Kudus saat ini dimaksudkan sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

Satu diantara infrastruktur dan fasilitas yang sedang dikembangkan yakni dibidang kesehatan.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal, menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai wujud perhatian, Pemerintah Kabupaten Kudus terus menggenjot pembangunan fasilitas kesehatan agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Satu diantaranya yakni penganggaran DBHCHT Cukai yakni 40 persen untuk penggunaan revitalisasi fasilitas kesehatan di Kabupaten Kudus.

"Penggunaan dana cukai itu 40 % -nya kami gunakan dibidang kesehatan. Beberapa juga untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

DBHCHT peruntukan bidang kesehatan diantaranya yakni untuk pelayanan kesehatan seperti promotif, preventif, maupun kuratif dengan prioritas penurunan stunting

Selain itu penyediaan, peningkatan sarana atau prasarana fasilitas kesehatan, pengolahan limbah dan air bersih. Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk.

"Saat ini ada beberapa pembangunan fasilitas kesehatan yang masih berjalan. Ini akan kita kejar agar 2023 bisa cepat terselesaikan," ucapnya.

Pj Bupati Kudus juga mengimbau agar masyarakat untuk bersama memberantas peredaran rokok ilegal dengan cara tidak memproduksi, mengonsumsi, dan mengedarkan.

Menurutnya, dengan memberantas peredaran rokok ilegal dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dana cukai.

"Kenapa rokok ilegal harus digempur? Karena tidak ada standarisasi komposisi, yang bisa membahayakan konsumen. Selain itu, berpengaruh pada pendapatan DBHCHT. Maka laporkan jika menemukan, pelapor akan dilindungi," imbaunya.